



## PENGUATAN LEMBAGA DESA DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI

No	Penulis	Email
1	Marthen Patiung	patiungmarthen@yahoo.com
2	Dimas Agustian	dimas.agustian.adm@unimor.ac.id
3	Surya Yudha Regif	suryaregif@unimor.ac.id
4	Herminus Kefi	herminus13@gmail.com
5	Yohanes Fina	yohanesfina@unimor.ac.id

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Timor

 patiungmarthen@yahoo.com

### Abstrak

Pengabdian masyarakat ini berfokus pada peran strategis penguatan lembaga desa dalam upaya mewujudkan desa mandiri. Kegiatan ini merupakan bagian dari praktik kerja mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan, menganalisis potensi, dan memberikan rekomendasi konkret bagi lembaga desa dalam meningkatkan kapasitas tata kelola, partisipasi masyarakat, dan pengembangan ekonomi lokal. Metode pelaksanaan melibatkan observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan desa, serta Focus Group Discussion (FGD) dengan aparat desa Bitefa dan perwakilan masyarakat. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan desa, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan inovasi pelayanan, berkorelasi positif dengan peningkatan kemandirian desa. Rekomendasi yang dihasilkan mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia desa, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta fasilitasi kemitraan strategis dengan pihak eksternal.

**Kata Kunci:** Lembaga Desa, Desa Mandiri, Penguatan Kapasitas, Partisipasi Masyarakat, Tata Kelola Desa.

 ©2025. Diterbitkan oleh Jurnal Umum Pengabdian Masyarakat (JUPEMAS).

Artikel ini memiliki akses terbuka di bawah lisensi BY-NC

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

## 1. Pendahuluan

Desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan amanat besar bagi desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat<sup>1</sup> istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep<sup>2</sup> desa mandiri menjadi cita-cita bersama, di mana desa memiliki kemampuan untuk mengelola potensi dan sumber dayanya secara optimal demi kesejahteraan warganya tanpa terlalu bergantung pada bantuan eksternal.

Namun, dalam perjalanannya, banyak desa masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan kemandirian ini. Salah satu faktor krusial yang menentukan keberhasilan adalah kapasitas dan peran lembaga desa. Lembaga desa, seperti Pemerintah Desa Bitefa, Badan Permusyawaratan Desa Bitefa (BPD), serta lembaga kemasyarakatan lainnya (RT/RW, PKK, Karang Taruna), adalah pilar utama dalam merumuskan kebijakan, mengelola program, dan memobilisasi

partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan lembaga desa menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya desa mandiri.

Kegiatan praktik kerja mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor ini didesain untuk secara langsung terlibat dalam proses penguatan lembaga desa. Fokus utama adalah mengidentifikasi aspek-aspek krusial yang memerlukan intervensi, menganalisis dampak dari penguatan tersebut, dan merumuskan strategi keberlanjutan yang dapat diadopsi oleh desa untuk mencapai status mandiri.

Konsep desa mandiri di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan melalui pembangunan berkelanjutan (Nugraha & Saputra, 2023). Di Nusa Tenggara Timur (NTT), pemerintah melaksanakan program Desa Mandiri Anggur Merah untuk menanggulangi kemiskinan dengan memberikan hibah kepada desa-desa terpilih untuk pengembangan usaha kecil (Toda, 2016) Program ini dirumuskan oleh gubernur dan pejabat provinsi, dengan keterlibatan terbatas dari pemerintah daerah dan badan pemberdayaan masyarakat (NGATU, 2020) Transformasi desa menjadi entitas yang mandiri melibatkan peningkatan berbagai dimensi, termasuk ketahanan ekonomi, indikator kesehatan, dan ketahanan ekologis (Suhartono & Citra Y, 2022) Strategi untuk mencapai kemandirian desa meliputi seminar pemasaran digital untuk UMKM, seminar kesehatan, dan kompetisi permainan tradisional ((Nugraha & Saputra, 2023). Upaya ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing daerah (Toda, 2016)

## 2. Metode

---

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Bitefa pada tanggal 25 Juli 2024 hingga 20 Agustus 2024. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan partisipatif, melibatkan secara aktif aparat desa, anggota lembaga desa, dan masyarakat setempat. Tahapan pelaksanaan meliputi:

### 1. Identifikasi dan Pemetaan Masalah:

Survei awal dan observasi untuk memahami struktur kelembagaan desa, program yang sedang berjalan, serta tantangan yang dihadapi. Wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan perspektif menyeluruh tentang kondisi desa dan peran lembaga desa.

### 2. Analisis Potensi Desa:

Diskusi terfokus dengan aparat desa dan perwakilan masyarakat untuk mengidentifikasi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi ekonomi lokal yang belum teroptimalkan. Analisis kebijakan desa terkait dengan pengelolaan potensi tersebut.

### 3. Pelatihan dan Pendampingan:

Penyelenggaraan lokakarya atau pelatihan singkat (jika ada) yang relevan dengan kebutuhan desa, misalnya, pelatihan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang partisipatif, pengelolaan keuangan desa, atau digitalisasi layanan desa. (Sesuaikan jika ada kegiatan pelatihan spesifik yang dilakukan mahasiswa) Pendampingan dalam implementasi program atau kegiatan yang sedang berjalan di desa.

### 4. FGD dan Perumusan Rekomendasi:

Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk membahas temuan, mengevaluasi praktik baik, dan merumuskan rekomendasi strategis bagi penguatan lembaga desa. Penyusunan laporan hasil kegiatan yang mencakup rekomendasi kebijakan dan program bagi pemerintah desa. Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif, bersumber dari wawancara, observasi, dan catatan diskusi, yang kemudian dianalisis secara deskriptif interpretatif untuk menarik kesimpulan dan rekomendasi

## 3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Praktik Kerja Mahasiswa (PKM) Fakultas FISIP Universitas Timor yang dilaksanakan di Desa Bitefa, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara, merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor. Desa Bitefa dipilih sebagai lokasi kegiatan karena letaknya yang strategis di wilayah perbatasan dan memiliki potensi lokal yang besar namun belum sepenuhnya terkelola secara optimal.



Foto Kegiatan Bersama Kepala Desa Bitefa dan Mahasiswa

PKM ini mengusung tema “Penguatan Lembaga Desa dalam Mewujudkan Desa Mandiri”, dengan fokus utama pada pemberdayaan kelembagaan desa sebagai pilar utama pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Kegiatan ini

bertujuan untuk mendukung upaya pemerintah desa Bitefa dalam memperkuat kapasitas perangkat desa, lembaga kemasyarakatan (BPD, LPM, PKK, Karang Taruna), serta mengembangkan potensi lokal melalui kolaborasi antara mahasiswa dan masyarakat desa. Rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi:

- A. Observasi dan Identifikasi Masalah Mahasiswa melakukan survei awal untuk mengenali kondisi sosial, ekonomi, serta kelembagaan desa Bitefa. Hasil observasi ini digunakan sebagai dasar perencanaan program yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat Bitefa.
- B. Sosialisasi dan Penyuluhan Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya tata kelola desa yang baik, partisipasi dalam perencanaan pembangunan, serta peran strategis kelembagaan desa Bitefa dalam mencapai kemandirian desa.
- C. Pelatihan difokuskan pada peningkatan kapasitas perangkat desa Bitefa dan lembaga terkait, seperti pelatihan penyusunan peraturan desa, pengelolaan administrasi, dan pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis sumber daya alam desa.
- D. Refleksi dan Evaluasi Pada akhir kegiatan, dilakukan evaluasi bersama antara mahasiswa, dosen pembimbing, dan pemerintah desa Bitefa untuk menilai dampak kegiatan serta merumuskan tindak lanjut yang dapat diadopsi oleh desa secara mandiri.
- E. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman langsung di lapangan, tetapi juga turut berkontribusi dalam proses pembangunan desa Bitefa. Sementara itu, masyarakat Desa Bitefa mendapatkan manfaat berupa peningkatan kapasitas, kesadaran kolektif, serta semangat gotong royong dalam membangun desa mereka menuju kemandirian.

### 3.1.Simpulan

Penguatan lembaga pada desa Bitefa merupakan fondasi utama dalam mewujudkan desa mandiri. Melalui praktik kerja mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor ini, terbukti bahwa intervensi yang terarah pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi partisipasi masyarakat, dan pengembangan potensi ekonomi lokal, dapat secara signifikan mendorong kemajuan desa. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan desa, didukung oleh pendampingan berkelanjutan, akan mempercepat terwujudnya desa yang berdaya, mandiri, dan sejahtera.

### Daftar Pustaka

---

- Agustian, D., Patiung, M., Sitorus, D. R. H., Nitsae, E. S., & Tes, M. T. (2024). SOSIALISASI BAHAYA DAN DAMPAK HUMAN TRAFFICKING PADA DESA LAKANMAU KABUPATEN BELU. *Jurnal Umum Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 7-10. <https://doi.org/10.58290/jupemas.v3i3.292>

- Agustian, D., Gumelar, A. I., Regif, S. Y., & Naif, Y. I. (2024). PELATIHAN KELEMBAGAAN DAN BUDIDAYA TANAMAN BAYAM (*Amarantus L*) SECARA ORGANIK DI KELOMPOK TANI SINAR MORUKREN KABUPATEN MALAKA NUSA TENGGARA TIMUR. *Jurnal Umum Pengabdian Masyarakat*, 2(4), 84-90. <https://doi.org/10.58290/jupemas.v2i4.215>
- Mangara, T. H., & Syaifudin, R. (2023). SOSIALISASI INDEKS DESA MEMBANGUN DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN DESA BUNGURCOPONG. *Jurnal Umum Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 57-61. Diambil dari <https://jurnal-cahayapatriot.org/index.php/jupemas/article/view/68>
- NGATU, F. (2020). ANALISIS KEBIJAKAN DESA MANDIRI ANGGUR MERAH UNTUK RAKYAT MENUJU SEJAHTERA (ANGGUR MERAH) DI PROVINSI NTT. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 5(1), 15-28. <https://doi.org/10.14710/politika.5.1.2014.15-28>
- Nugraha, A., & Saputra, Y. (2023). Independent creative village program as an effort to prosper the community based on village potential. *Journal of Community Service in Science and Engineering (JoCSE)*, 2(2), 42. <https://doi.org/10.36055/jocse.v2i2.21835>
- Suhartono, S., & Citra Y, N. (2022). Transformasi Pembangunan Desa Menuju Desa Mandiri. *National Multidisciplinary Sciences*, 1(1), 60-62. <https://doi.org/10.32528/nms.v1i1.12>
- Toda, H. (2016). STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI NUSA TENGGARA TIMUR. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1). <https://doi.org/10.31506/jap.v7i1.2448>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.